



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN OTONOMI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARSO SUSILO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH
3. NHK : 222928

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

2.223.270.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 377.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 306.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/210 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 332.550.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/114 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 367.320.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 215.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

305.800.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2006, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.800.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2011, LAINNYA Rp. 130.000.000
4. MOBIL, JEEP CHEROKEE Tahun 1997, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 297.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 524.976.768 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 618.315.551 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.969.362.319 |
| III. HUTANG | Rp. | 143.110.150 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.826.252.169 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.